

**ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Wahyu Sapto Rini
Gemi Ruwanti**

SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin
Jalan H. Hasan Basry No.9-11 Banjarmasin 70123 Telp. 0511-3304652 Faks.0511-3305238

Artikel info

Keywords: analysis, reports,
realization, budget

Abstract

This study aimed to analyze the budget and actual expenditure in South Kalimantan Province Education Department for the fiscal year 2012 to fiscal year 2014. The analysis used the analysis of quantitative and qualitative analysis by comparing the budget with expenditures, fiscal year 2012 to fiscal year 2014 at the Department of Education of South Kalimantan Province and analyze the implementation of the budget is based on interviews with financial managers in South Kalimantan Provincial Education Department. The results showed that during the three-year comparative analysis of budget realization suggests there is instability in the realization. The evaluation results were not up to occur in service improvement program administration offices providing services subpart correspondence in fiscal year 2012 with a budget ceiling of Rp. 15,000,000.00 only realized Rp. 3,629,100.00 or 24.19%. In fiscal year 2013 with a budget ceiling of Rp. 20,500,000.00 only realized Rp. 3,008,500.00 or equivalent to 14.68%. In fiscal year 2014, with a budget ceiling of Rp. 34,000,000.00 only realized Rp. 3,419,000.00 or equivalent to 10.06%. Absorption budget can not be implemented optimally partly caused by various factors such as non-performance activities, the high value of the budget cap and the lack of coordination between the Technical Activities Executive Officer with the commission inactivities.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang APBN/APBD selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN/APBD. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Novita, 2014).

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan kas secara nasional yaitu fokus mendorong proposionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satuan kerja. Siklus anggaran terdiri atas beberapa tahap mulai dari tahapan persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi serta yang terakhir pelaporan dan evaluasi anggaran terkait dengan prinsip akuntabilitas, yang mempunyai ciri berisikan umpan balik pengukuran kinerja anggaran, yang menjadi informasi masukan bagi perencanaan siklus anggaran berikutnya.

Anggaran dilaksanakan pada periode satu tahun kedepan yang tentunya mengacu kepada anggaran dan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai tolak ukur pembuatan anggaran berikutnya.

Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah tidak jarang terjadi revisi anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena anggaran kurang tepat sasaran dan perlu dilakukan revisi anggaran. Akan tetapi revisi anggaran hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu pada triwulan ke III tahun yang bersangkutan. Perubahan revisi atau revisi anggaran yang dilakukan tidak boleh merubah Pagu Anggaran yang telah disetujui dan hanya merubah nilai nominal dari kegiatan yang ada, menambahkan dana yang lebih diperlukan dan mengurangi dana yang sifatnya dapat ditunda pelaksanaannya sehingga pada jumlah akhirnya tetap akan sesuai dengan nilai Pagu Anggaran.

Sebagai salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dengan tujuan terwujudnya proses pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan keragaman kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab pokok sebagaimana instansi pemerintah lainnya yaitu menciptakan pelayanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mencakup fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka mencapai realisasi yang sesuai dengan anggaran, pemerintah memberikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi pemerintah guna mewujudkan tanggungjawab pokok di atas. Penggunaan dari dana pemerintah baik yang bersumber dari APBN

maupun APBD harus dipertanggungjawabkan laporan keuangannya salah satunya dengan membuat laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Berdasarkan data tabel 1 masih ada penyerapan anggaran yang masih tidak terlaksana secara maksimal karena berbagai alasan, seperti tidak terlaksananya kegiatan, tingginya nilai pagu anggaran sehingga kurang maksimalnya pencapaian anggaran pada akhir tahun serta secara langsung akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan kondisi yang ada peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014. Mengingat objek analisisnya berupa studi kasus pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan maka pendekatan penelitian ini ber-

sifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskriptifkan secara sistematis faktual dan akurat terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya diteliti dan dianalisis melalui suatu penjelasan yang memuat proses penalaran dan penafsiran yang logis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan data kuantitatif berupa data laporan realisasi anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara langsung ke obyek penelitian yaitu pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian di instansi tersebut.

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diperlukan untuk mengetahui prosedur dan kebijakan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Tabel 1.1 Data Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2012	356.571.455.895,00	344.468.694.798,00	96,61
2	2013	555.138.258.040,00	532.455.917.694,00	95,91
3	2014	412.273.654.463,00	397.625.450.638,00	96,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2. Jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	356.571.455.895,00	344.468.694.798,00	96,61
2.	2013	555.138.258.040,00	532.455.917.694,00	95,91
3.	2014	412.273.654.463,00	397.625.450.638,00	96,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan penjelasan secara bertahap mengenai pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing.

Dalam tahap analisis data tindakan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung, data yang diperoleh dapat langsung dianalisis.

Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun anggaran, dimana jumlah sampel tersebut terdiri dari data realisasi ang-

garan tahun 2012 sampai dengan data realisasi anggaran tahun 2014.

Untuk lebih jelas mengenai realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang diteliti, dapat dilihat pada Tabel 2.

Hasil penelitian pada tahap akhir adalah melakukan perbandingan hasil pengukuran berdasarkan pendekatan penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun anggaran yang telah terjadi. Dimana dari ketiga tahun anggaran yang dilakukan untuk pengukuran anggaran yang ada terhadap realisasi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran tahun 2012

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2012 menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp. 356.571.455.895,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 344.468.694.798,00 atau sebesar 96,61%, dengan rincian:

- a) Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai: 94,87%.
- b) Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 93,15%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 90,52%; Program Peningkatan Disiplin Aparatur: 100%; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: 97,53%; Program Pendidikan Menengah: 96,43%; Program Pendidikan Non Formal: 95,23%; Program Pendidikan Luar

Biasa: 98,27%; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga: 96,89%; Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: 93,06%.

2. Realisasi Anggaran tahun 2013

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2013 menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp 555.138.258.040,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 532.455.917.694,00 atau sebesar 95,91%, dengan rincian:

- a) Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai: 95,66%.
- b) Belanja Tidak Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 89,87%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 90,05%; Program Peningkatan Disiplin Aparatur: 97,48%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 95,49%; Program Pendidikan Anak Usia Dini: 97,21%; Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun: 98,79%; Program Pendidikan Menengah: 93,15%; Program Pendidikan Non Formal: 95,54%; Program Pendidikan Luar Biasa: 99,18%; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: 89,85%; Program Pendidikan Dasar: 93,60%; Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan: 98,59%; Pembelajaran SLTA Berbasis Kompetensi; Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan: 96,15%, dan Pemerataan Akses Sekolah SLTA; Program Peningkatan Mutu Pendidik Guru: 84,65%; Pengembangan Pembelajaran SMP Berbasis Kompetensi Program Bina PAUS, Non Formal dan Informal: 84,03%; Program Peningkatan Pemberdayaan SMP, Penguatan: 94,57%; Kreativitas Siswa SMP dan PK LK; Program Bina Pendidikan SD: 91,62%; Program Penguatan Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun: 98,32%; Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs); Program Peningkatan dan

Pemerataan Kesempatan Belajar: 100%; Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan: 96,99%; Pembelajaran SD Berbasis Kompetensi; Program Pendidikan Non Formal dan Informal: 99,36%; Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan, 97,83% Prasarana PAUDNI.

3. Realisasi Anggaran tahun 2014

Hasil analisis yang terjadi pada tahun 2014 menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp 412.273.654.463,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 397.625.450.638,00 atau sebesar 96,45%, dengan rincian:

- a) Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai: 96,89%
- b) Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 83,24%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 94,37%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 95,82%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan: 100%; Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Pendidikan Anak Usia Dini: 99,38%; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: 97,37%; Program Pendidikan Menengah: 94,40%; Program Pendidikan Non Formal: 98,78%; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga: 98,68%; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: 92,24%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah: 96,75%; Program Peningkatan Pemberdayaan SMP, Penguatan: 98,56%; Kreativitas SMP dan PK LK; Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan: 97,46%; Prasarana PAUDNI; Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan: 96,43%; Pembelajaran SLTA Berbasis Kompetensi; Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan: 97,35%; dan Pemerataan Akses Sekolah SLTA; Program

Penguatan Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun: 99,35%; Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan: 89,49%; Pembelajaran SMP/MTs Berbasis Kompetensi; Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan: 94,73%; Pembelajaran SD Berbasis Kompetensi; Program Peningkatan Kompetensi Mutu Pendidikan: 90,54%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, dimana pengukuran realisasi anggaran merupakan suatu penilaian yang menjadi satu kesatuan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga jika sebuah organisasi dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melaksanakan kegiatan dan realisasi kegiataannya akan menjadi evaluasi dan pembahasan dalam setiap hasil akhir yang harus dicapai oleh setiap SKPD terkait.

Anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun anggaran 2012 anggaran belanja sebesar Rp356.571.455.895,00 pada tahun anggaran 2013 naik menjadi Rp555.138.258.040,00 tetapi pada tahun anggaran 2014 mengalami penurunan menjadi Rp412.273.654.463,00. Dengan besarnya jumlah anggaran belanja pada tiga tahun tersebut tidak diimbangi dengan naiknya realisasi.

Adanya penyerapan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai alasan sehingga berpengaruh terhadap kualitas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap kegiatan sehingga menyebabkan tidak terlaksana kegiatan,

tingginya nilai pagu anggaran juga merupakan penyebab tidak terealisasinya anggaran secara maksimal, serta kurangnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan.

Program Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012

Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%, tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang diantaranya:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada sub bagian penyediaan jasa surat menyurat, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.629.100,00 atau sebesar 24,19% dikarenakan terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang dan jasa pada bagian penyediaan jasa surat menyurat ini sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap secara maksimal. Hal ini selalu terjadi pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Pada sub bagian penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja air dengan anggaran sebesar Rp54.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp21.852.840,00 atau sebesar 40,47% dikarenakan terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja air sehingga pelaksanaan realisasinya kurang maksimal. Realisasi untuk biaya air hanya bisa dilakukan setelah pemakaian sehingga tidak bisa ditentukan seberapa besar anggaran yang dapat direalisasikan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada sub bagian pengadaan perlengkapan gedung kantor, belanja modal pengadaan alat pendingin dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 tidak dapat terea-

lisasi dikarenakan kurangnya koordinasi sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran ini dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pada sub bagian ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus lebih memaksimalkan pengawasan fungsi koordinasi kepada pelaksana kegiatan.

Pada sub bagian pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp136.975.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp62.436.290,00 atau sebesar 45,58% dikarenakan besarnya pagu anggaran sehingga realisasinya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang juga kurang maksimal penyerapannya dikarenakan kurangnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada pihak pelaksana kegiatan.

c. Program Pendidikan Menengah

Pada sub bagian penyusunan maket SMA Banua Kalsel dengan anggaran sebesar Rp100.000.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau sebesar 6% dikarenakan merupakan kegiatan yang baru sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan direncanakan akan lebih dimaksimalkan pada tahun anggaran berikutnya.

Program Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013

Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%, tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang diantaranya:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada sub bagian penyediaan jasa surat menyurat, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp20.500.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.008.500,00

atau sebesar 14,68% terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang dan jasa pada bagian penyediaan jasa surat menyurat ini sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap secara maksimal. Hal ini selalu terjadi pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Pada sub bagian penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.290.700,00 atau sebesar 31,45% dikarenakan besarnya nilai pagu anggaran sehingga tidak dapat terealisasi secara maksimal, selain itu juga dikarenakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dianggap masih berfungsi dengan baik sehingga penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sepenuhnya.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada sub bagian pengadaan perlengkapan gedung kantor, belanja modal pengadaan alat-alat studio dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada pelaksana kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana secara tahun anggaran ini dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pada sub bagian pengadaan peralatan gedung kantor, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi dengan anggaran sebesar Rp14.500.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau sebesar 31,03%. Hal ini dikarenakan besarnya pagu anggaran dan juga disebabkan karena kurangnya petugas pelaksana kegiatan sehingga realisasinya tidak dapat secara maksimal dilaksanakan.

Pada sub bagian pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan

anggaran sebesar Rp290.500.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp97.904.116,00 atau sebesar 33,70% dikarenakan besarnya pagu anggaran sehingga realisasinya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang juga kurang maksimal penyerapannya dikarenakan kurangnya pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada pihak pelaksana kegiatan.

Pada sub bagian pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp64.000.000,00 tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada pelaksana kegiatan sehingga kegiatan direncanakan ulang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

c. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada sub bagian kongres anak Indonesia anggaran sebesar Rp243.190.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp119.123.000,00 atau sebesar 49,98% dikarenakan pagu anggaran yang cukup besar dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kurang dari rencana kerja sehingga pelaksanaan realisasinya tidak dapat dilakukan secara maksimal.

d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pada sub bagian monitoring, evaluasi dan pelaporan, belanja jasa konsultan dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp59.850.000,00 atau sebesar 49,88% dikarenakan besarnya nilai pagu anggaran sehingga berpengaruh pada pencapaian realisasinya. Tidak diukurinya batas tertinggi anggaran menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Pendidik, Guru dan Pengembangan Pembelajaran SMP Berbasis Kompetensi

Pada sub bagian pengembangan program *lesson study* SMP dengan anggaran sebesar Rp345.770.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp164.145.000,00 atau sebesar 47,47% dikarenakan merupakan program yang baru dilaksanakan sehingga masih kurangnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan pelaksana kegiatan sehingga dalam pelaksanaan realisasinya tidak dapat secara maksimal.

f. Program Bina Pendidikan SD

Pada sub bagian workshop validasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD dengan anggaran sebesar Rp289.867.500,00 tidak terealisasi dikarenakan dianggap kurang tepat sasaran sehingga pelaksanaannya dibatalkan.

Program Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014

Ada beberapa kegiatan yang penyerapan dananya kurang dari 50%, tingginya nilai pagu anggaran dan perencanaan yang kurang matang diantaranya:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada sub bagian penyediaan jasa surat menyurat, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp34.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.419.000,00 atau sebesar 10,06% terlalu tingginya menaruh nilai pagu untuk belanja barang dan jasa pada bagian penyediaan jasa surat menyurat ini sehingga menyebabkan realisasi tidak dapat terserap secara maksimal. Hal ini selalu terjadi pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

b. Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan Pembelajaran SLTA Berbasis Kompetensi

Pada sub bagian kualifikasi S1 bagi guru SMA/SMK/MA dengan anggaran sebesar Rp195.600.000,00 tidak dapat terealisasi

karena dianggap kurang tepat sasaran sehingga tidak dilaksanakan pada tahun anggaran ini.

c. Program Peningkatan Mutu Guru dan Pengembangan Pembelajaran SMP/MTs Berbasis Kompetensi

Pada sub bagian kualifikasi S1 guru SMP/MTs (PGRI) dengan anggaran sebesar Rp1.182.260.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp472.500.000,00 atau sebesar 39,97% dikarenakan kurangnya koordinasi dan juga kurangnya peserta yang mengikuti pelatihan sehingga dalam pelaksanaan realisasinya tidak dapat secara maksimal.

Pada sub bagian piloting Al Qur'an SMP/MTs dengan anggaran sebesar Rp 418.310.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 170.180.000,00 atau sebesar 40,68% dikarenakan kurangnya pelaksana kegiatan sehingga tidak dapat terealisasi secara maksimal dan akan dimaksimalkan pada tahun anggaran berikutnya.

Masalah yang ada pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 tidak terlaksananya kegiatan, nilai pagu anggaran yang terlalu besar, perencanaan yang kurang matang menjadi faktor tidak terealisasinya anggaran secara maksimal.

Pada program pelayanan administrasi perkantoran sub bagian penyediaan jasa surat menyurat anggaran selama tiga tahun anggaran terus meningkat namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasinya. Besarnya anggaran, kurangnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis dengan pelaksana kegiatan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian.

PENUTUP

Simpulan

Pengukuran penilaian terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan

Provinsi Kalimantan Selatan seberapa besar tingkat kemajuan realisasi anggaran dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang ada selama tiga tahun anggaran yang telah dilaksanakan namun dirasakan masih kurang mencapai hasil yang maksimal.

Perbandingan evaluasi selama tiga tahun realisasi anggaran yang ada menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian realisasi. Hasil evaluasi yang tidak maksimal terjadi pada program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sub bagian penyediaan jasa surat menyurat yang pada tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp15.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.629.100,00 atau sebesar 24,19%. Pada tahun anggaran 2013 pagu anggaran sebesar Rp20.500.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp3.008.500,00 atau sebesar 14,68%. Pada tahun anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 34.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 3.419.000,00 atau sebesar 10,06%.

Penyerapan anggaran yang tidak dapat secara maksimal juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti tidak terlaksananya kegiatan, tingginya nilai pagu anggaran dan kurangnya koordinasi.

Saran

Penelitian ini kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran belanja yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang akan datang agar lebih memperhatikan nilai realisasi anggaran yang dilakukan dan penganggarnya yang tepat sehingga dalam pelaksanaannya realisasi dapat terlaksana secara maksimal.

Bagi pejabat pembuat anggaran agar dapat lebih teliti lagi pada saat menetapkan anggaran belanja terumata anggaran belanja

barang dan jasa untuk sub bagian penyediaan jasa surat menyurat sehingga sisa anggaran pada pos tersebut tidak terlalu besar.

Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih aktif dalam mengkoordinir kegiatannya sehingga tidak terjadi lagi kurangnya koordinasi kepada pelaksana kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Harijanto dan Lidia, 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1. Maret. Hal. 17-25. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6558>, diakses 23 Oktober 2015).
- Bastian, Indra dan Soepriyanto, 2000. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Carolina, Viani, 2012. *Analisis Anggaran dan Realisasi Kegiatan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas*. Skripsi. STIE Indonesia, Banjarmasin.
- Departemen Dalam Negeri RI, 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005)*. Fokus-media, Bandung.
- Eduard, Jantje, dan Lidia, 2015. Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 2 Juni. Hal. 852-862. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/8908/8450>, diakses 23 Oktober 2015).
- Mamesah, D.J., 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2003. Bunga Rampai. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta.
- Novita, Nova, 2014. *Evaluasi Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara*. Skripsi. STIE Indonesia, Banjarmasin.
- Pusdiklatwas, BPKP, 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*.
- Riyanthy, Maya, 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong*. Skripsi. STIE Indonesia, Banjarmasin.
- Suriyono, 2000. *Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja*. Yogyakarta. (<http://www/disdik.kalselprov.go.id/> diakses 27 Desember 2015).